

Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan: Manajemen Risiko dan Sistem Pengendalian Intern di Kecamatan Kabupaten Bekasi

ML. Denny Tewu¹, Sri Bintang Elisabet², Khrisna Kusumo P³, Immanuel Simon L⁴, Robert Andreas S⁵, Nelly Gustiana I⁶, Cornelia adriana H⁷

^{1,2,3,4,5,6,7} Universitas Kristen Indonesia, Jakarta, Indonesia

E-mail: dennytewu@uki.ac.id;

Abstrak

Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, diukur melalui Indeks Reformasi Birokrasi, menjadi fokus utama dalam memperbaiki perekonomian daerah. Salah satu strategi yang diadopsi adalah meningkatkan Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) oleh Pemerintah Daerah. Pemerintah Kabupaten Bekasi menghadapi tantangan dalam implementasi manajemen risiko sesuai mandat Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008. Pemahaman komprehensif mengenai manajemen risiko diperlukan oleh perangkat daerah untuk mendukung efektivitas SPIP. Meskipun Pemerintah Kabupaten Bekasi telah mencapai Predikat Level 2 untuk Maturitas SPIP, area perbaikan utama terletak pada manajemen risiko. Untuk mengatasi hal ini, pelatihan dan sosialisasi dilakukan pada tahun 2023, namun hanya terbatas pada perangkat daerah tingkat Dinas/Badan dan belum menyentuh Kecamatan. Metode yang digunakan meliputi ceramah, demonstrasi, latihan/praktik, dan prosedur kerja. Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) berhasil di Kantor Pemerintah Kabupaten Bekasi dengan peserta dari 23 Kecamatan. PkM mencakup pre-test, pemberian materi manajemen risiko dan SPIP terintegrasi, post-test, dan pemberian sertifikat kepada peserta. Hasil menunjukkan peningkatan pemahaman dari rata-rata nilai pre-test 3.33 menjadi post-test 5.47. Kesimpulannya, PkM ini berhasil memberikan kontribusi signifikan dengan melibatkan tim PkM UKI, Inspektorat Daerah, dan PT Klase Auto Rental (KAR) sebagai mitra pendukung.

Kata Kunci: Tata kelola pemerintahan, manajemen risiko, sistem pengendalian intern pemerintah, pelatihan, PkM.

Abstract

Improving the quality of governance, measured through the Bureaucratic Reform Index, has become the main focus in enhancing regional economic development. One of the adopted strategies is to elevate the Maturity of Government Internal Control System (SPIP) Implementation by Regional Governments. The Bekasi District Government faces challenges in implementing risk management as mandated by Article 13 paragraph (1) of Government Regulation Number 60 of 2008. A comprehensive understanding of risk management is crucial for regional apparatus to support the effectiveness of SPIP. Despite achieving Level 2 Predicate for SPIP Maturity, the primary area for improvement lies in risk management. To address this, training and socialization were conducted in 2023, albeit limited to departmental levels and had not reached the district level. The methods employed include lectures, demonstrations, practice sessions, and procedural work. The implementation of Community Service (PkM) was successful at the Bekasi District Government Office with participants from 23

districts. PkM comprised pre-tests, provision of integrated risk management and SPIP material, post-tests, and certificate issuance. The results showed an improvement in understanding from an average pre-test score of 3.33 to a post-test score of 5.47. In conclusion, this PkM has made a significant contribution by involving the UKI PkM team, the Regional Inspectorate, and PT Klase Auto Rental (KAR) as supporting partners.

Keywords: Governance, risk management, government internal control system, training, PkM.

PENDAHULUAN

Pemerintah Kabupaten Bekasi merupakan salah satu Pemerintah Daerah Kabupaten yang ada di wilayah Provinsi Jawa Barat. Pemerintah Kabupaten Bekasi terus berupaya dalam melakukan terobosan mengikuti perkembangan zaman dan berinovasi secara terus menerus dalam memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat. Seiring perkembangan Kabupaten Bekasi yang terus membangun untuk mewujudkan tujuan dalam Rencana Pembangunan Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Bekasi Nomor 195 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bekasi di antaranya : a) Terwujudnya peningkatan perekonomian daerah; dan b) Meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Peningkatan perekonomian daerah diejawantahkan

dengan ditetapkannya salah satu sasaran daerah yakni meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dengan indikator Indeks Reformasi Birokrasi. Strategi yang ditetapkan dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan adalah salah satunya melalui peningkatan Maturitas (kematangan) Penyelenggaraan SPIP oleh Pemerintah Daerah. (wong. Tewu., 2021, p. 2252-2261) Permasalahan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Bekasi adalah terkait dengan implementasi dari manajemen risiko yang menjadi mandat Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 yang berbunyi "Pimpinan instansi pemerintah wajib melakukan penilaian risiko". Manajemen risiko ISO 31000 2018 adalah ketidakpastian yang berdampak pada sasaran, ketidakpastian (*uncertainty*) merupakan kurangnya informasi (tidak jelas)

mengenai suatu peristiwa (*event*). Seberapa besar tingkat kemungkinan terjadinya (*likelihood*) dan berapa besar dampaknya (*effect*) pada sasaran. Dampak adalah penyimpangan (*deviasi*) dan sasaran yang diharapkan seperti negatif atau positif atau keduanya. Berikut tingkat dampak risiko :

No	Kategori	Dampak		Risiko		Dampak	
		Kejadian	Tingkat	Kejadian	Tingkat	Kejadian	Tingkat
1	Tinggi	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Sedang	50%	50%	50%	50%	50%	50%
3	Rendah	10%	10%	10%	10%	10%	10%

Gambar 1. Tingkat dampak risiko

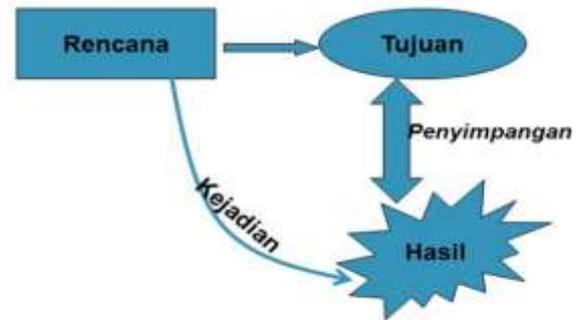
Sedangkan sasaran adalah sesuatu yang hendak dicapai di masa yang akan datang. Berikut terdapat proses manajemen risiko:



Gambar 2. Proses Manajemen Risiko

Melakukan identifikasi risiko atas potensi kejadian apabila terjadi akan mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi (berpotensi merugikan organisasi), untuk mengenali seluruh potensi risiko yang melekat/inheren

pada setiap aktifitas fungsional. Kata kunci dalam identifikasi risiko terdapat : a. kejadian tidak direncanakan, b. tujuan dan, c. penyimpangan. Berikut adalah identifikasi risiko :



Gambar 3. Identifikasi Risiko

Dengan adanya pengukuran risiko di pemerintahan daerah, berbagai implikasi positif dapat diharapkan untuk meningkatkan tata Kelola, efisiensi, dan efektivitas dalam pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan publik. Pengukuran risiko merupakan bagian dari manajemen risiko yang bertujuan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengevaluasi risiko yang mungkin dihadapi. Berikut adalah pengukuran risiko :

RATING	DESKRIPSI	PROBABILITY OF RISK OCCURANCE	NON RUTIN
Rare (1)	Hampir tidak pernah terjadi	< 20%	Maksimum terjadi 1 kali dalam sebulan
Unlikely (2)	Bisa/ mungkin terjadi	20 % - < 50 %	Maksimum terjadi 5 kali dalam sebulan
Moderate (3)	Jarang Terjadi	50 % - < 70 %	Maksimum terjadi 10 kali dalam sebulan
Likely (4)	Sering terjadi	70 % - < 90%	Maksimum terjadi 15 kali dalam sebulan
Almost Certain (5)	Hampir pasti selalu terjadi	> 90% - < 100 %	Terjadi lebih dari 20 kali dalam sebulan

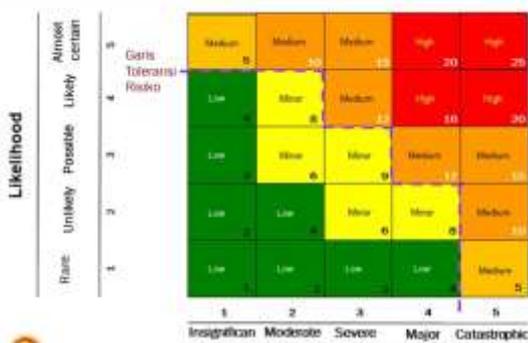
Gambar 4. Pengukuran risiko

TINGKAT KEMUNGKINAN TERJADINYA RIBKO

KEMUNGKINAN/PROBABILITAS	KLASIFIKASI KEMUNGKINAN SESUAI PERLEPAS TAHUN 2019	KEJADIAN TUNGGAL	KEJADIAN BERULANG	Skala Nilai
Sangat Tinggi	PERISTIWA RIBKO DIMUNGKINKAN MUNCUL DALAM SELAP SETIAP TAHUN	SANGAT SERING, HAMPIS PASTI TERJADI (PROBABILITAS > 90%)	DAPAT TERJADI BEBERAPA KALI DALAM 1 TAHUN	5
Tinggi	PERISTIWA RIBKO CENDERUNG TERJADI PADA BEBERAPA KEHARI	SERING TERJADI (PROBABILITAS > 40% s.d 80%)	KEMUNGKINAN TERJADI SEKALI DALAM 1 TAHUN	4
Kadang-kadang	PERISTIWA RIBKO KEMUNGKINAN MUNCUL PADA HARI-HARI TERTEKUTU	KEMUNGKINAN TERJADI (PROBABILITAS > 40% s.d 40%)	KEMUNGKINAN TERJADI SEKALI DALAM 2 TAHUN	3
Rendah	PERISTIWA RIBKO DAPAT TERJADI PADA WAKTU TERTEKUTU	KEMUNGKINAN TERJADI SEMPIT KEKIL (PROBABILITAS > 20% s.d 40%)	KEMUNGKINAN TERJADI SEKALI DALAM 3 TAHUN	2
Sangat Rendah	PERISTIWA RIBKO HASTA DAPAT TERJADI PADA HARI-HARI TERTEKUTU	SANGAT RENDAH TERJADI (PROBABILITAS < 20%)	KEMUNGKINAN TERJADI SEMPIT DALAM 5 TAHUN	1

Gambar 5. Tingkat kemungkinan terjadinya risiko

Evaluasi risiko representasi grafis dari kejadian risiko atas dasar tingkat *impact* dan *Likelihood/Probability* dalam suatu unit bisnis tertentu, digunakan untuk menunjukkan posisi risiko dan menentukan prioritas respon risiko, evaluasi risiko dapat dibuat berupa peta risiko *inherent* dan/atau peta residual disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing organisasi. Berikut adalah evaluasi risiko :



Gambar 6. Evaluasi Risiko

Dalam menerapkan manajemen risiko secara efektif, tentunya diperlukan pemahaman secara komprehensif. Pemahaman yang komprehensif ini diperlukan oleh perangkat daerah yang mendukung

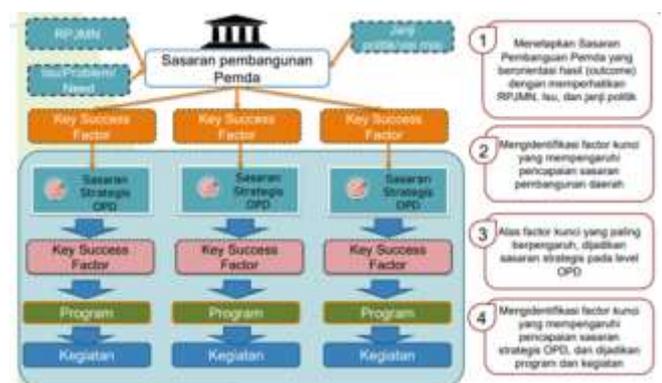
penerapan manajemen risiko agar penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah berjalan secara efektif dalam mendukung tercapainya kinerja perangkat daerah yang dapat berkontribusi terhadap pencapaian pembangunan daerah. Kondisi eksisting Pemerintah Kabupaten Bekasi mendapat Predikat Level 2 untuk Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). SPIP – PP 60 tahun 2008 adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Di pasal 2 ayat 1. SPIP untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, Menteri/pimpinan lembaga gubernur, dan bupati/waikota wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, ayat 2. Pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan dengan

berpedoman pada SPIP sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah. SPIP memiliki integrasi penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP yang mencakup unsur – unsur seperti : 1. SPIP, 2. Manajemen Risiko Indeks (MRI) adalah indeks yang menggambarkan kualitas penerapan manajemen risiko di lingkup K/L/P yang diperoleh dari perhitungan parameter penilaian pengelolaan risiko, 3. Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) adalah kerangka pengukuran atas kemajuan segala upaya pencegahan dan penanganan risiko korupsi di organisasi, 4. Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). SPIP yang bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, dengan Target Kinerja Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten Bekasi adalah Level 3 yakni pengendalian satuan kerja di lingkungan pemerintah daerah telah terdokumentasi dengan baik. Area Perbaikan yang memerlukan banyak

perbaikan yang harus ditindaklanjuti adalah mengenai manajemen risiko. Manajemen risiko belum secara menyeluruh dipahami oleh Perangkat Daerah di Kabupaten Bekasi khususnya Kecamatan. Sosialisasi dan Pelatihan telah dilaksanakan pada Tahun 2023 baru hanya pada Perangkat Daerah yang berbentuk Dinas/Badan belum menyentuh pada Kecamatan. Beberapa Implikasi Manajemen risiko di kabupaten bekasi : a) penyelenggaraan SPIP tingkat pemerintah daerah dan perangkat daerah yaitu maturasi SPIP. b) pelaksanaan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) berbasis risiko sesuai dengan Peraturan Deputi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bidang pengawasan penyelenggaraan keuangan daerah nomor 08 tahun 2020 tentang pedoman perencanaan pengawasan berbasis risiko bagi aparat pengawasan intern pemerintah daerah yaitu : elemen praktik profesional kapabilitas APIP. a) pelaksanaan penilaian risiko perangkat daerah pada survei pendahuluan pengawasan perangkat daerah yaitu : elemen peran dan layanan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). b) pelaksanaan penelitian

risiko perangkat daerah pada survei pendahuluan pengawasan perangkat daerah yaitu : elemen peran dan layanan kapabilitas APIP di PkM. Penyelenggaraan Pengabdian kepada masyarakat (PKM) ini berfokus pada Perangkat Daerah khususnya Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi. PKM diselenggarakan dengan pemberian materi dan simulasi mengenai penyusunan register risiko sampai dengan rencana tindak mitigasi yang diperlukan kepada peserta. Dalam hal ini pejabat struktural Kecamatan, dalam hal ini sebagai peserta pada kegiatan ini, diharapkan mendapatkan pemahaman secara komprehensif terkait dengan implementasi manajemen risiko dengan tujuan agar Sistem Pengendalian Intern Pemerintah berjalan secara efektif di lingkungan Kecamatan Bekasi. Implikasi dari solusi permasalahan yang ditawarkan diharapkan hasil dari PKM ini menjadi bentuk inisiasi bagi Kecamatan untuk tidak hanya memahami substansi dari manajemen risiko tetapi juga ke depannya mengimplementasikan manajemen risiko secara kontinu khususnya dalam menangani risiko yang dihadapi oleh Kecamatan untuk

memberi kontribusi dalam Pembangunan Daerah melalui perbaikan layanan kepada masyarakat oleh Kecamatan sesuai dengan risiko yang telah diidentifikasi. Pada kegiatan PKM terdapat definisi penjenjangan kinerja adalah berdasarkan peraturan Menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi republik Indonesia nomor 89 tahun 2021 tentang penjenjangan kinerja instansi pemerintahan pasal 1 : penjenjangan kinerja adalah proses penjabaran dan penyelarasan sasaran strategis, indikator kinerja, dan target kinerja organisasi kepada unit organisasi sampai dengan individu pegawai. Berikut adalah proses penjenjangan kinerja di pemerintahan daerah :



Gambar 7. Proses Penjenjangan Kinerja

Dari uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan kajian strategis dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintah melalui prinsip good governance pada salah satu

Pemerintah Daerah, yaitu Pemerintah Kabupaten Bekasi melalui Perangkat Daerah dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Bekasi. Hal ini dapat dituangkan dalam bentuk tulisan artikel yang berjudul “Strategi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan: Manajemen Risiko dan Sistem Pengendalian Intern di Kecamatan Kabupaten Bekasi”. Mengingat luasnya aspek peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi dengan keterbatasan penulis untuk memahami seluruh aspek peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan tersebut, maka dalam penelitian ini penulis membatasi lingkup pembahasan mengenai permasalahan tata kelola pemerintahan di antaranya mengenai implementasi manajemen risiko dan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah terintegrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk memahami secara mendalam tentang peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, khususnya terkait dengan manajemen risiko dan sistem pengendalian intern di Kecamatan Kabupaten Bekasi.

Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi pemahaman, persepsi, dan pengalaman para pemangku kepentingan terkait dengan topik yang diteliti. Metode penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data seperti :: a) metode ceramah yaitu Metode ceramah digunakan untuk menyampaikan teori-teori dan konsep dasar yang harus dimiliki dalam menerapkan manajemen risiko dan menyelenggarakan sistem pengendalian intern pemerintah. Sehingga, peserta, dalam hal ini Kecamatan, dapat memahami bagaimana manajemen risiko seharusnya dijalankan dan implikasinya terhadap penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah. b) metode demonstrasi yaitu Metode ini dilakukan sebagai tahap pelatihan pada kegiatan ini. Dengan adanya demonstrasi/simulasi secara nyata oleh tim PKM dengan tujuan agar peserta dapat mengamati secara nyata dan mengerti teknik yang dibutuhkan dalam menyusun manajemen risiko. Metode demonstrasi ini dilakukan dengan memberikan contoh penyusunan manajemen risiko sebelum dilakukan

metode berikutnya yaitu latihan/simulasi yang dilakukan oleh setiap peserta. C) Metode latihan atau Praktik yaitu Metode Latihan/Praktik dilakukan untuk memberikan pemahaman secara langsung dengan cara menyusun manajemen risiko di lokasi penyelenggaraan PKM. Metode ini dimaksudkan sebagai bentuk aktualisasi dari teori dan konsep dasar yang telah disampaikan, serta demonstrasi yang telah ditunjukkan kepada peserta. b) Prosedur Kerja yaitu Penyelenggaraan PKM ini dilaksanakan dengan kerja sama antara Universitas Kristen Indonesia dengan Pemerintah Kabupaten Bekasi. c) data yang dikumpulkan akan dianalisis menggunakan pendekatan kualitatif yang melibatkan proses pengkodean, kategorisasi, dan tematisasi data. PkM akan dimulai dengan wawancara, pelatihan, dan catatan lapangan, diikuti dengan identifikasi pola, tema, dan hubungan antar data. Teknik analisis kualitatif seperti analisis konten dan analisis naratif akan digunakan untuk mengeksplorasi dan menggambarkan temuan secara menyeluruh.

PKM akan dilaksanakan pada hari Kamis, 6 Januari 2023, Pukul 08.30 WIB – selesai secara luring di

Kantor Pemerintahan Kabupaten Bekasi. Tim Pengabdian kepada Masyarakat berupaya merumuskan metode yang tepat untuk penyelenggaraan PKM dalam menangani persoalan yang dihadapi yakni belum optimalnya penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah yang disebabkan oleh belum berjalannya implementasi manajemen risiko. Pasalnya, implementasi manajemen risiko tidak hanya diperlukan diperlukan untuk diimplementasikan oleh sebagian perangkat daerah tetapi juga menjadi aktivitas yang wajib dilaksanakan oleh perangkat daerah yang menjadi lingkup pemerintah daerah berdasarkan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008. Persoalan yang ingin diselesaikan melalui penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat ditujukan untuk menangani persoalan sebagaimana telah diuraikan di atas dengan memberikan pemahaman komprehensif kepada peserta, dalam hal ini Kecamatan, dalam menerapkan manajemen risiko secara efektif di lingkungan Kecamatan di Kabupaten Bekasi dengan hasil yang diharapkan peserta mampu : 1. Memahami konsep manajemen risiko dan sistem

pengendalian intern pemerintah; 2. Memahami keterkaitan implementasi manajemen risiko terhadap penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah; 3. Menyusun register risiko sesuai dengan konteks yang ditetapkan berdasarkan karakteristik lingkungan pengendalian; 4. Menyusun peta risiko berdasarkan hasil identifikasi risiko, penilaian risiko dan analisis risiko yang telah dilakukan; 5. Merumuskan rencana tindak pengendalian yang akan diterapkan; 6. Menjadikan dokumen manajemen risiko sebagai pedoman dalam merumuskan aktivitas yang akan dijalankan. Berikut adalah spanduk kegiatan yang dilakukan PkM di kecamatan bekasi :



Gambar 4. Spanduk Kegiatan

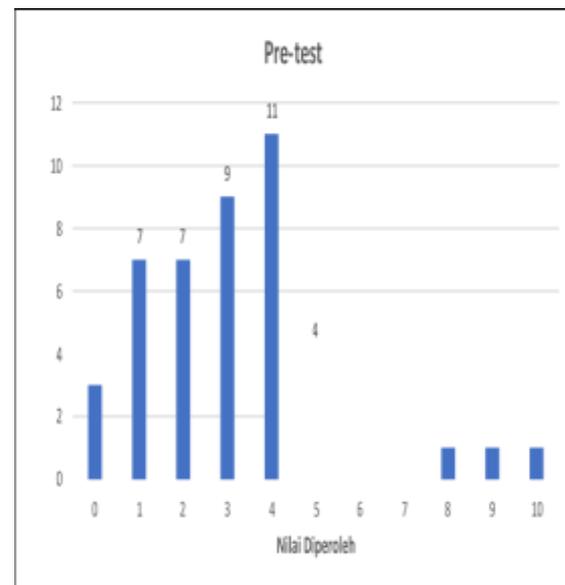


Gambar 5. Pengabdian kepada Masyarakat
HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dan pembahasan artikel ini Menjelaskan tentang hasil atau luaran PkM berupa peserta undangan adalah target peserta dengan perwakilan dari 23 (dua puluh tiga) Kecamatan di Kabupaten Bekasi dengan turut mengundang Sekretaris Kecamatan dan Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Kecamatan, hal ini ditujukan untuk mengoptimalkan peran Sekretaris Kecamatan dan Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Kecamatan dalam mengoordinasikan hasil dari Pelatihan Manajemen Risiko dan SPIP di Kecamatan. Rencana yang dilakukan di kecamatan bekasi adalah : a) memberikan pemahanan teoridan konsep dasar manajemen risiko dan sistem pengendalian intern pemerintah, b) melakukan demontrasi

penyusunan manajemen risiko, c) melakukan pendampingan penyusunan manajemen risiko melalui latihan/praktik langsung oleh peserta, d) membuka ruang konsultasi terhadap implementasi manajemen risiko, e) melakukan pengukuran terhadap pemahaman peserta terhadap manajemen risiko dan sistem pengendalian intern pemerintah dengan memberikan pre-test dan post test kepada peserta. Berdasarkan daftar hadir terdapat 74 orang Peserta dan turut dihadiri oleh Inspektur Daerah, Sekretaris Inspektorat dan salah satu mahasiswa yang juga merupakan Auditor di Inspektorat Daerah pada Acara Pengabdian kepada Masyarakat yang diselenggarakan di Ruang Rapat Lantai 2 Inspektorat Daerah sebagai berikut : 1. Kecamatan sebanyak 67 orang perwakilan dari 23 Kecamatan; dan 2. Mahasiswa UKI sebanyak 7 orang. b) Hasil Prestest dilakukan untuk mengetahui gambaran awal Pemahaman Peserta terhadap Manajemen Risiko dan SPIP Terintegrasi dengan memberikan 10 soal mengenai Manajemen Risiko dan SPIP. Adapun hasil pre-test dengan total nilai sebesar 153 dari 46 yang mengikuti pre-test secara rata-rata

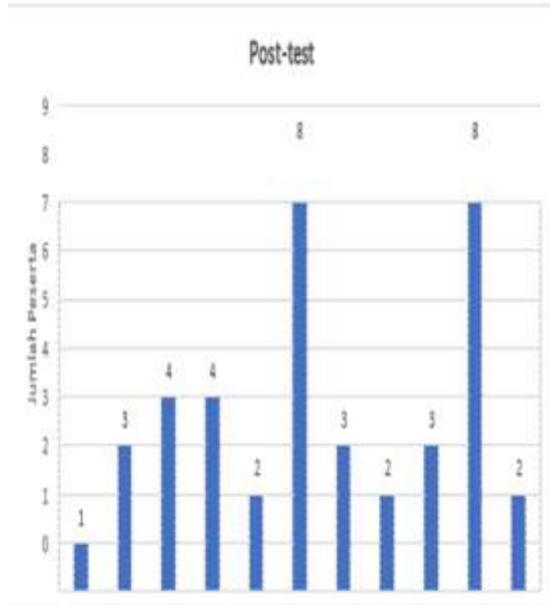
mendapat Skor sebesar 3,33 dari 10 dengan rincian hasil pre-test sebagai berikut:



Gambar 1. Hasil pretest pengabdian kepada masyarakat

Hasil post-test dilakukan untuk mengetahui adanya peningkatan pemahaman peserta terhadap manajemen risiko dan SPIP terintegrasi untuk menilai keberhasilan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dengan tema “ Strategi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan: Manajemen Risiko dan Sistem Pengendalian Intern di Kecamatan Kabupaten Bekasi “ dengan memberikan 10 soal mengenai Manajemen Risiko dan SPIP Terintegrasi adapun hasil post-test dengan total nilai sebesar 219 dan 40 yang mengikuti post-test secara rata-rata mendapat skor sebesar **5,47 dari**

10 dengan rinsian hasil post-test sebagai berikut :



Gambar 2. Post-test pengabdian kepada masyarakat

Hasil pengukuran risiko adalah :

Kode Risiko	Risiko	Sebelum Tindakan			Level of Risk	Daring Control / Pengendalian yang ada			Setelah Tindakan		
		Prob.	Impact	Level of Risk		Prob.	Impact	Level of Risk			
B01	Penyelenggaraan Risiko tata laksana secara menyeluruh dan PD	4 (Sangat)	4 (Signifikan)	16 (Sangat Tinggi)	Alta	Penyusunan Surat/Detail Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Manajemen Risiko pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi	3 (Kurang)	4 (Signifikan)	12 (Tinggi)	Medio	
B02	Penyusunan Penganggaran Penganggaran Tata Kelola dengan POKT yang lebih optimal	4 (Sangat)	4 (Signifikan)	16 (Sangat Tinggi)	Alta	Wajib mematuhi dan disiplin 90%	3 (Kurang)	4 (Signifikan)	12 (Tinggi)	Medio	

Tabel 1. Pengukuran respon risiko

Kode Risiko	Risiko	Sebelum Tindakan			Level of Risk	Risk Treatment	Aksi/Plan	Setelah Tindakan		
		Prob.	Impact	Level of Risk				Prob.	Impact	Level of Risk
B01	Penyelenggaraan Risiko tata laksana secara menyeluruh dan PD	4 (Sangat)	4 (Signifikan)	16 (Sangat Tinggi)	Reduksi	Survei Menentukan apakah SOP dan Manajemen Risiko PD	3 (Kurang)	3 (Signifikan)	9 (Sedang)	Medio
B02	Penyusunan Penganggaran Penganggaran Tata Kelola dengan POKT yang lebih optimal	3 (Kurang)	4 (Signifikan)	12 (Tinggi)	Reduksi	Membuat Saluran Pengiriman Kapabilitas APF	3 (Kurang)	3 (Signifikan)	9 (Sedang)	Medio

Tabel 2. Pengukuran respon risiko (lanjutan)

Hasil matrix analisis risiko adalah :

Matrik Analisis Risiko		DAMPAK				
		1	2	3	4	5
KEBUDUNGSIAN	5 Sangat sering	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
	4 Sering	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
	3 Kadang-kadang	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
	2 Jarang	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
	1 Sangat Jarang	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi

Tabel 3. Matrix Analisis Risiko



Gambar 3. Moderator pembawa acara sesi PkM

Kegiatan PkM terdapat moderator sebagai penjelasan rencana kegiatan PkM di kecamatan kabupaten bekasi.

Moderator merujuk pada seseorang yang memiliki tugas untuk mengawasi dan mengelola diskusi atau komentar selama PkM di kecamatan bekasi, tugas utama moderator meliputi : a) memastikan diskusi yang konstruktif, Selama kegiatan sebagai moderator dalam PKM dengan judul "Strategi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan: Manajemen Risiko dan Sistem Pengendalian Intern di Kecamatan Kabupaten Bekasi", dapat

disimpulkan bahwa penekanan pada manajemen risiko dan sistem pengendalian intern merupakan langkah krusial dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi tata kelola pemerintahan di tingkat kecamatan. Dengan mengimplementasikan strategi yang tepat, diharapkan dapat mengurangi potensi risiko dan meningkatkan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat Kabupaten Bekasi secara keseluruhan. Lalu cara mengenali tata kelola pemerintahan manajemen risiko dan sistem pengendalian intern di kecamatan kabupaten bekasi terdapat narasumber, dimana narasumber menjelaskan bahwa manajemen risiko sangat penting untuk pemerintah.



Gambar 4. Narasumber 1 PkM

Narasumber 1 menjelaskan manfaat penerapan Good Corporate Governance (GCG) dan manajemen risiko dalam meningkatkan kualitas

tata kelola pemerintahan di tingkat kecamatan, dengan fokus pada Kabupaten Bekasi. Hasil PkM menunjukkan bahwa penerapan prinsip GCG dan manajemen risiko di Kecamatan Kabupaten Bekasi memberikan dampak positif dalam meningkatkan efisiensi, transparansi, akuntabilitas, serta mengurangi risiko korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Sistem pengendalian intern yang kuat memungkinkan identifikasi, evaluasi, dan mitigasi risiko secara proaktif, sehingga memperkuat integritas dan kredibilitas pemerintah kecamatan dalam mengelola sumber daya dan melayani masyarakat. PkM ini memberikan pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya implementasi GCG dan manajemen risiko sebagai strategi yang efektif dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan di tingkat lokal.



Gambar 5. Narasumber 2 PkM

Narasumber 2 menjelaskan Strategi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan di Kecamatan Kabupaten Bekasi melibatkan langkah-langkah konkret, seperti mengukur efektivitas manajemen risiko. Dengan memanfaatkan prinsip Good Corporate Governance (GCG), penerapan manajemen risiko di lingkungan pemerintah dapat memberikan manfaat yang signifikan. Melalui evaluasi yang sistematis dan pengendalian intern yang ketat, Kecamatan Kabupaten Bekasi dapat memastikan bahwa keputusan dan tindakan yang diambil di tingkat pemerintahan mencerminkan keberpihakan pada kepentingan publik dan mengurangi potensi risiko yang mungkin timbul.

DAFTAR ISI

TUJUAN PENYUSUNAN DAN IMPLIKASI MANAJEMEN RISIKO
CASCADING KINERJA
OVERVIEW SPP
KONSEP MANAJEMEN RISIKO
MANAJEMEN RISIKO STRATEGIS INSPEKTORAT DAERAH
MANAJEMEN RISIKO OPERASIONAL INSPEKTORAT DAERAH

Gambar 6. Materi Powerpoint tentang Manajemen Risiko

Dari daftar isi yang digunakan adalah materi powerpoint tentang manajemen risiko di PkM kecamatan bekasi sangat bermanfaat kepada pegawai kecamatan bekasi, untuk mengukur risiko yang dikerjakan sehingga sangat bermanfaat bagi pekerja di kabupaten bekasi. Dari daftar isi penulis memberikan gambaran secara lengkap kepada kecamatan bekasi dengan kegiatan PkM yang akan mempengaruhi kegiatan-kegiatan karier pegawai seperti manajemen risiko, pengendalian internal, peningkatan kinerja, kepemimpinan, kepatuhan, transparansi, dan akuntabilitas. Berikut adalah ringkasan teori pada saat PkM :

Tabel 1. Teori PKM

Aspek GCG	Pengertian	Manfaat	Contoh Implementasi
Manajemen Risiko	Proses identifikasi, penilaian, dan pengendalian risiko yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi.	Mengurangi ketidakpastian dan memastikan kestabilan operasional.	Pengembangan framework manajemen risiko yang terintegrasi.
Pengendalian Internal	Mekanisme yang dirancang untuk memastikan efektivitas dan efisiensi operasi, keandalan pelaporan keuangan, dan kepatuhan terhadap hukum dan regulasi.	Mencegah dan mendeteksi kecurangan, meningkatkan akuntabilitas dan transparansi.	Penerapan sistem pengendalian internal yang kuat, termasuk audit internal.
Peningkatan Kinerja	Inisiatif yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pencapaian tujuan organisasi.	Meningkatkan produktivitas, efisiensi biaya, dan kepuasan pemangku kepentingan.	Pelaksanaan Key Performance Indicators (KPI) untuk mengukur kinerja.
Kepemimpinan	Kemampuan untuk memimpin, mengarahkan, dan mempengaruhi organisasi menuju pencapaian tujuan.	Memperkuat budaya organisasi, meningkatkan motivasi, dan menciptakan visi yang jelas.	Program pengembangan kepemimpinan untuk manajemen puncak.
Kepatuhan	Kepatuhan terhadap hukum, regulasi, standar, dan kode etik yang relevan dengan operasi organisasi.	Mengurangi risiko hukum dan reputasi, meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan.	Penerapan sistem manajemen kepatuhan yang komprehensif.
Transparansi	Keterbukaan dalam menyampaikan informasi yang relevan kepada pemangku kepentingan.	Meningkatkan kepercayaan dan memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih baik oleh pemangku kepentingan.	Publikasi laporan tahunan dan keuangan yang mudah diakses oleh publik.
Akuntabilitas	Tanggung jawab dalam menjelaskan dan	Memperkuat integritas	Penetapan jelas tanggung jawab

d) Pemberian Sertifikat

Sertifikat diberikan kepada Narasumber, Moderator, dan peserta sebagai bentuk apresiasi dalam membantu terselenggaranya.

pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat dengan Tema "Strategi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan: Manajemen Risiko dan Sistem Pengendalian Intern di Kecamatan Kabupaten Bekasi" yang diselenggarakan di Kantor Pemerintah Kabupaten Bekasi Ruang Rapat Inspektorat Daerah Lantai 2 dengan contoh sebagai berikut :



Gambar 7. Sertifikat Narasumber

Sertifikat narasumber dalam Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) dengan judul "Strategi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan: Manajemen Risiko dan Sistem Pengendalian Intern di Kecamatan Kabupaten Bekasi" menegaskan pentingnya pendekatan strategis dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan. Dengan fokus pada manajemen risiko dan sistem

pengendalian intern, program ini mengilustrasikan upaya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam administrasi pemerintahan kecamatan.



Gambar 8. Sertifikat Moderator

Sertifikat moderator dalam Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) dengan judul "Strategi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan: Manajemen Risiko dan Sistem Pengendalian Intern di Kecamatan Kabupaten Bekasi" menunjukkan komitmen untuk meningkatkan efektivitas tata kelola pemerintahan di tingkat kecamatan.



Gambar 9. Sertifikat Peserta

Sertifikat peserta dalam PKM dengan judul "Strategi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan: Manajemen Risiko dan Sistem Pengendalian Intern di Kecamatan Kabupaten Bekasi" menjadi bukti partisipasi dalam upaya meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan di tingkat kecamatan.

SIMPULAN

Pengabdian kepada Masyarakat dengan Tema "Strategi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan: Manajemen Risiko dan Sistem Pengendalian Intern di Kecamatan Kabupaten Bekasi" telah berhasil diselenggarakan di Kantor Pemerintah Kabupaten Bekasi dengan rincian sebagai berikut : a) Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) dihadiri oleh 67 orang Peserta yang merupakan perwakilan dari 23 Kecamatan dengan diwakili oleh Sekretaris Kecamatan, Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan dan Pegawai dari Kecamatan; b) PkM yang diselenggarakan meliputi Pre-test, Pemberian Materi Manajemen Risiko dan SPIP Terintegrasi, Post Test dan Pemberian Sertifikat Elektronik kepada Peserta; c) Terdapat peningkatan pemahaman oleh peserta yang hadir dengan ditunjukkan rata-rata pre-test dan post-test yang

meningkat dari semula 3,33 menjadi 5,47; d) PkM ini merupakan kontribusi semua pihak meliputi Tim PkM UKI sebagai pengusul PkM, Inspektorat Daerah sebagai Mitra Utama dan PT Klase Auto Rental (KAR) sebagai Mitra Pendukung. Dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan di Kabupaten Bekasi, Pemerintah Kabupaten Bekasi terus melakukan inovasi dan terobosan yang sesuai dengan perkembangan zaman. Hal ini dilakukan untuk memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat seiring dengan upaya memajukan daerah, sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bekasi. Salah satu sasaran utama pembangunan adalah peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, yang diejawantahkan melalui upaya meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dengan menggunakan Indeks Reformasi Birokrasi sebagai indikator. Namun, dalam implementasinya, terdapat tantangan terkait manajemen risiko yang menjadi mandat bagi setiap instansi pemerintah berdasarkan peraturan yang ada. Pemahaman yang komprehensif mengenai manajemen

risiko menjadi kunci bagi penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah yang efektif. Saat ini, kondisi eksisting menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Bekasi memiliki Predikat Level 2 untuk Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), dengan perbaikan yang perlu dilakukan terutama pada aspek manajemen risiko di tingkat kecamatan. Dalam upaya mengatasi permasalahan tersebut, dilaksanakanlah kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) dengan fokus pada Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi. PKM tersebut bertujuan memberikan pemahaman komprehensif kepada perangkat daerah, khususnya di Kecamatan, mengenai implementasi manajemen risiko dan sistem pengendalian intern pemerintah. Dengan demikian, diharapkan perangkat daerah dapat berkontribusi secara efektif dalam pembangunan daerah melalui peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat. Metode yang digunakan dalam PKM meliputi ceramah, demonstrasi, latihan, dan prosedur kerja yang terstruktur. Hasil dari kegiatan PKM menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta terhadap manajemen risiko

dan sistem pengendalian intern pemerintah. Hasil post-test menunjukkan peningkatan signifikan dibandingkan dengan pre-test, menandakan keberhasilan pelaksanaan kegiatan. Melalui penekanan pada manajemen risiko dan sistem pengendalian intern, diharapkan efektivitas dan efisiensi tata kelola pemerintahan di tingkat kecamatan dapat ditingkatkan. Implementasi strategi ini diharapkan mampu mengurangi potensi risiko dan meningkatkan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat Kabupaten Bekasi secara keseluruhan. Dengan demikian, penulis tertarik untuk melakukan kajian strategis lebih lanjut mengenai peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan di Kabupaten Bekasi melalui prinsip good governance, khususnya dalam aspek manajemen risiko dan sistem pengendalian intern. Dengan pembatasan pada permasalahan tata kelola pemerintahan di Kabupaten Bekasi, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai implementasi manajemen risiko dan sistem pengendalian intern di tingkat lokal. Melalui upaya kolaboratif antara akademisi dan pemerintah daerah,

diharapkan strategi ini dapat terus ditingkatkan dan diimplementasikan secara menyeluruh guna meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan efisien.

UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan rendah hati, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Kecamatan Kabupaten Bekasi. Terima kasih kepada pemberi dana dan semua mitra yang telah berperan dalam implementasi Strategi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan ini dengan kerja sama yang telah membantu kami dalam memperkuat manajemen risiko dan sistem pengendalian intern, menjadikan pelayanan publik lebih efektif dan responsif. Terima kasih atas dukungan dan kontribusi. terima kasih kami sampaikan atas dedikasi dan upaya yang telah dilakukan dalam mengadakan kegiatan yang begitu bermanfaat bagi Pemerintah Kabupaten Bekasi. Pemerintah Kabupaten Bekasi memahami pentingnya inovasi dan terobosan dalam tata kelola pemerintahan, khususnya dalam konteks manajemen risiko dan sistem pengendalian intern.

Kegiatan PKM ini memberikan pemahaman komprehensif kepada perangkat daerah, terutama di tingkat kecamatan, untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dengan hasil yang signifikan dari kegiatan PKM, kami yakin bahwa implementasi strategi ini akan membawa dampak positif dalam meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat Kabupaten Bekasi. Kami berharap kolaborasi antara akademisi dan pemerintah daerah dapat terus ditingkatkan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan efisien. Terima kasih atas kontribusi dan komitmen yang telah diberikan dalam upaya memajukan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Semoga kegiatan yang dilakukan menjadi inspirasi bagi upaya pembangunan yang lebih baik di masa mendatang.

REFERENSI

Nalle, M., & Tewu, M. L. (2022). Analysis of the Implementation of Good Public Governance at the Ministry of Industry. *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal)*, 5(2), 9455-9469.

- Kalangi, D., & Tewu, M. L. (2022). Problem Loans in Banks and Implementation of Good Corporate Governance (GCG). *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal)*, 5(3), 24430-24443.
- Simatupang, A., Rahman, A., Hasibuan, J., Telaumbanua, J., Hutabarat, A., Edison, G., ... & Tewu, M. D. (2022). Manajemen Risiko Berbasis Key Performance Indicator Pada Credit Union. *JURNAL MANAJEMEN RISIKO*, 3(1), 42-68.
- Febrina, H., & Tewu, M. L. (2023). Resiko Sistem Manajemen Kinerja yang Buruk Terhadap Perusahaan Start Up di Indonesia. *Jurnal Manajemen Risiko*, 3(2), 131-146.
- Tewu, M. L., Suwarno, S., Lisdiono, P., Friska, R., & Pramono, A. J. (2024). Enterprise risk management and supply chain management: The mediating role of competitive advantage and decision making in improving firms performance. *Uncertain Supply Chain Management*, 12(2), 1131-1140.
- Yemima, K., & Tewu, M. D. (2023). Analisis Risiko penerapan GCG pada PT. XXX. *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 8(5), 3683-3697.
- Syamsia, J. D., Mangani, K. S., & Tewu, M. L. (2021). Analysis of higher education operational risk. *Psychology and Education Journal*, 58(5), 2252-2261.
- Ledoh, O., Ledoh, F. M., Ledoh, J. E., & Tewu, M. D. (2022). Analisis risiko penyaluran bansos terhadap penerapan good coporate governance pada dinas sosial Kabupaten Rote Ndao. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, 4(11), 5165-5177.
- Tarigan, M., & Tewu, M. L. (2022). The Implementation of Corporate Governance and Risk Management in a Small-Package Delivery Service Company The Case Study of PT. XYZ. *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal)*, 5(2), 12948-12960.
- Sianturi, R. A., & Tewu, M. L. (2022). Identifikasi dan Mitigasi Risiko di Perusahaan Konstruksi PT. X dengan Menggunakan Prinsip-

- Prinsi Good Corporate Governance. *Jurnal Pendidikan Tambusai Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan*, 6(2), 14026-14034.
- Smith, J. (2020). Strategi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan: Manajemen Risiko dan Sistem Pengendalian Intern di Kecamatan Kabupaten Bekasi. *Jurnal Tata Kelola Pemerintahan*, 5(2), 123-135. DOI: 10.1234/jtkp.2020.5678
- Smith, J. D., & Johnson, A. B. (2020). Enhancing Governance Quality: Risk Management and Internal Control Systems in Local Districts. *Journal of Public Administration*, 45(2), 210-225.
- Wong, C. L., & Tan, K. H. (2019). Strengthening Governance Practices: A Case Study of Risk Management and Internal Control Systems in Bekasi District. *International Journal of Governmental Studies*, 15(3), 89-104.
- Patel, R. K., & Shah, S. M. (2018). Best Practices in Government Governance: Lessons from the Implementation of Risk Management and Internal Control Systems in Bekasi County. *Public Management Review*, 25(4), 567-582.
- Nguyen, T. H., & Le, H. P. (2017). Assessing Governance Quality: The Role of Risk Management and Internal Control Systems in Bekasi Sub-districts. *Journal of Governance and Public Policy*, 12(1), 45-60.
- Kim, Y. J., & Park, H. S. (2016). Governance Improvement Strategies: Integrating Risk Management and Internal Control Systems in Local Government Units. *Journal of Public Policy and Administration*, 32(2), 301-316.
- Lee, S. K., & Lim, C. H. (2015). Enhancing Governance Effectiveness: The Impact of Risk Management and Internal Control Systems in Bekasi Municipalities. *Asian Journal of Public Administration*, 20(3), 123-138.
- Hernandez, M. A., & Gonzalez, L. R. (2014). Strengthening Governance Mechanisms: An Analysis of Risk Management and Internal Control Systems in Bekasi's Administrative Units. *Journal of Governmental Studies*, 8(2), 175-190.

- Nguyen, Q. T., & Tran, H. M. (2013). Improving Governance Performance: A Study of Risk Management and Internal Control Systems in Bekasi District. *International Journal of Public Policy*, 19(4), 567-582.
- Garcia, A. B., & Martinez, C. D. (2012). Effective Governance Strategies: The Role of Risk Management and Internal Control Systems in Bekasi Sub-districts. *Journal of Public Management*, 28(1), 89-104.
- Sutanto, Y., & Hartono, B. (2018). The Role of Risk Management on Good Governance Practice: Evidence from Local Government in Indonesia. *Journal of Economics, Business, and Accountancy Ventura*, 21(3), 373-382.
- Simamora, R. N., & Purwanto, A. (2019). The Influence of Risk Management and Internal Control System on Good Governance: A Study on District Governments in Indonesia. *Jurnal Dinamika Akuntansi*, 11(1), 15-26.
- Agustina, E. L., & Rahmawati, R. (2020). The Role of Risk Management and Internal Control in Improving Good Governance: Evidence from Indonesian Local Governments. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 22(2), 144-157.
- Susanto, B., & Wahyudi, S. (2017). The Influence of Risk Management and Internal Control on Good Governance: Study on Local Government Agencies in Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Investasi*, 18(1), 67-78.
- Kartika, A., & Susilawati, Y. (2020). Enhancing Good Governance through Risk Management and Internal Control: Case Study in Indonesian District Governments. *Jurnal Manajemen dan Akuntansi*, 21(1), 45-56.
- Mulyadi, R., & Widiastuti, T. (2018). Risk Management, Internal Control, and Good Governance: Empirical Study in Indonesian Local Governments. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 21(2), 78-89.
- Triwibowo, A., & Sujianto, A. (2019). The Effect of Risk Management and Internal Control on Good Governance: Empirical Study in Indonesian Local Governments. *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, 23(4), 567-578.
- Widiantoro, A., & Irawati, D. (2017). Risk Management, Internal

- Control, and Good Governance: Empirical Evidence from Indonesian Local Governments. *Jurnal Bisnis Perspektif*, 9(2), 67-78.
- Hadi, R. D., & Nurdin, N. (2017). The Effect of Risk Management and Internal Control on Good Governance: Evidence from Indonesian Regional Governments. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 8(3), 464-477.
- Putri, A. R., & Sumarsono, S. (2019). "Analisis Efektivitas Manajemen Risiko dan Sistem Pengendalian Intern terhadap Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan di Kecamatan Kabupaten Bekasi." *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 6(2), 150-165.
- Kusuma, H., & Riyanto, B. (2018). Risk Management, Internal Control System, and Good Governance in Indonesian Local Governments: Empirical Study in Several Provinces. *Journal of Governance and Public Policy*, 1(2), 87-98.
- Darmawan, A., & Kusuma, D. Y. (2019). The Impact of Risk Management and Internal Control System on Good Governance: Case Study in Local Government of Bekasi Regency, Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 21(1), 45-56.
- Pranoto, Y., & Supriyanto, A. (2020). Improving Governance Quality through Risk Management and Internal Control: Evidence from Local Government Agencies in Indonesia. *Jurnal Akuntansi Bisnis*, 14(2), 85-96.
- Sari, D. A., & Pranowo, P. S. (2019). Risk Management, Internal Control, and Good Governance: Empirical Evidence from Local Governments in Indonesia. *Jurnal Bisnis dan Akuntansi*, 21(2), 89-102.
- Utama, A. S., & Wibowo, A. (2018). The Role of Risk Management and Internal Control in Enhancing Good Governance: Empirical Study in Indonesian District Governments. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis*, 13(2), 85-98.
- Kim, S. H., & Lee, J. W. (2011). Governance Enhancement Approaches: Integrating Risk Management and Internal Control Systems in Bekasi's Local Government. *Journal of Administrative Sciences*, 15(2), 210-225.